

PENDIDIKAN POLITIK ISLAMI BERDASARKAN WORLDVIEW ISLAM

Mohamad Latief¹, Hisyam Syamil²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

Email: ahmad.latief@unida.gontor.ac.id

Abstrak: Desakralisasi politik dihubungkan dengan desakralisasi agama dalam realitas sosial yang kemudian ditiadakan karena tidak dapat memberikan argumen rasional untuk mencari solusi atas masalah kehidupan manusia. Desakralisasi politik tidak mencirikan tirani dan demokrasi menjadi sama, dan tidak berfungsi sebagai penguatan basis kekuasaan dan menjaga kesinambungan identitas kolektif. Gejala yang berbanding terbalik ini ditandai dengan munculnya penampakan politik (*political appearance*) yang menyerupai agama, atau dapat disebut dengan politisasi agama. Populisme dapat mengambil berbagai bentuk seperti gerakan politik yang menggunakan agama sebagai pembenaran untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Pandangan hidup Barat modern yang kemudian menjadi program filsafat, menghasilkan paham sekularisme yang sudah tentu merupakan produk dari tradisi intelektual dan kultural Barat yang mengartikan berkembangnya sains, akan sangat memiliki ketergantungan dengan pandangan manusia terhadap dunia ini dikosongkan dari kepercayaan terhadap kekuatan supernatural yang menjaga dunia ini. Doktrin ini memojokkan agama menjadi urusan individu yang tidak lagi boleh masuk dalam ranah publik. Makalah ini menggambarkan problem desakralisasi politik Barat dan sakralisasi politik yang ada di dalam Islam dengan menggambarkan konsep politik dari tokoh-tokoh Islam dan konsep Islamisasi al-Attas sebagai upaya untuk mengkritik desakralisasi politik, serta mengintegrasikan konsep-konsep sakralisasi politik yang ada di Barat dengan Islam

Kata kunci: *politik, Islam, pendidikan, manusia*

1. PENDAHULUAN

Desakralisasi politik dihubungkan dengan desakralisasi agama dalam realitas sosial yang kemudian ditiadakan karena tidak dapat memberikan argumen rasional untuk mencari solusi atas masalah kehidupan manusia. Desakralisasi politik tidak mencirikan tirani dan demokrasi menjadi sama, dan tidak berfungsi sebagai penguatan basis kekuasaan dan menjaga kesinambungan identitas kolektif. Gejala yang berbanding terbalik ini ditandai dengan munculnya penampakan politik (*political appearance*) yang menyerupai agama, atau dapat disebut dengan politisasi agama. Populisme dapat mengambil berbagai bentuk seperti gerakan politik yang menggunakan agama sebagai pembenaran untuk mewujudkan cita-cita politiknya (Al-Attas, 1993). Tindakan tersebut didasarkan pada pemahaman agama tertentu yang kemudian diisi dengan konten politik atau bisa juga terjadi karena konten politik yang kemudian diberi pembenaran agama. Di mana wajah agama disuarakan dengan narasi kebencian dan permusuhan. Sedangkan sakralisasi politik adalah upaya untuk membingkai politik praktis dengan ajaran agama di mana individu atau kelompok yang merangkulkannya berusaha untuk selalu menghindari diskusi terbuka terhadap lawan-lawan mereka, itu lah yang

disebut dengan “political sacralization” , dan tak jarang, hukum positif diabaikan oleh kepentingan politik.

Berbanding dengan itu, di dalam Politik Barat banyak mengalami begitu banyak Sekularisasi yang mengartikan dengan proses terjadinya pemisahan agama dari dunia. Istilah ini senada dengan pernyataannya Aguste Comte yang mengatakan bahwa sekularisasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan modern dan menjadi sebuah kemestian bagi manusia yang hidup di zaman modern. Teori ini diaminii oleh Durkheim, Weber, Marx, Freud, dan belakangan oleh Thomas Luckman dan Bryan Wilson yang dikenal ‘secularization thesis’ alias secularizationism. Harvey Cox, seorang teolog Protestan mencatat bahwa sekularisasi dan urbanisasi dalam perspektif teologi bahwa, justifikasi teologis melebihi konsep dari para pendahulunya. Menurutnya, sekularisasi adalah pembebasan manusia dari proteksi agama dan metafisika, pengalihan dari alam lain kepada dunia ini. Ia menyimpulkan bahwa, sekularisasi tidak bisa lagi dibendung, sehingga orang terpaksa untuk belajar untuk menghindari diri agar tidak tersingkir dari pentas kehidupan. Bagi Cox, masyarakat mestinya mengikuti saran Dietrich Bonhoeffer untuk belajar berbicara tentang Tuhan dan menafsirkan kitab suci dengan cara sekuler (Cox, 2013).

Desakralisasi politik yang diusung oleh kaum sekularis berbeda dengan pandangan dunia Islam, di mana agama memiliki peran besar dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Konsep desakralisasi politik bahwa Barat sekuler membentang tidak terlepas dari pengalaman pahitnya yang terbatas pada dominasi para pemimpin gereja dan tirani. Pandangan hidup Barat modern yang kemudian menjadi program filsafat, menghasilkan faham sekularisme yang sudah tentu merupakan produk dari tradisi intelektual dan kultural Barat yang mengartikan berkembangnya sains, akan sangat memiliki ketergantungan dengan pandangan manusia terhadap dunia ini dikosongkan dari kepercayaan terhadap kekuatan supernatural yang menjaga dunia ini. Doktrin ini memojokkan agama menjadi urusan individu yang tidak lagi boleh masuk dalam rungan publik (Latief, Zarkasyi, dkk., 2022a).

Makalah ini menggambarkan problem desakralisasi politik Barat dan sakralisasi politik yang ada di dalam Islam dengan menggambarkan konsep politik dari tokoh-tokoh Islam dan konsep Islamisasi al-Attas sebagai upaya untuk mengkritik desakralisasi politik, serta mengintegrasikan konsep-konsep sakralisasi politik yang ada di Barat dengan Islam (Mas’ud, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan Metode Deskriptif dan Analisis, Metode Deskriptif adalah Metologi yang berusaha untuk menggambarkan suatu yang terjadi (Abuddin, 2004). Serta memberikan nilai atas penjabaran yang telah di deskripsikan). Pada pembahasan ini penulis menggunakan metode ini untuk mendiskripsikan Pandangan konsep al-Attas mengenai jiwa ini juga telah memberikan banyak sekali pencerahan terhadap permasalahan umat Islam saat ini, terutama dalam bidang pendidikan. Hal ini karena beliau tidak hanya menjelaskannya secara teoritik, tapi juga banyak yang mencontohkannya melalui pendidikan diantaranya dengan mencatat manusia dengan jiwa yang bersih supaya bisa bermanfaat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep pendidikan politik islami

Agama, sebagaimana dinyatakan banyak kalangan, dapat dipandang sebagai instrument ilahiah untuk memahami tatanan alam semesta. Kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia. Pandangan itu telah menjadi inspirasi bagi penganutnya untuk meyakini Islam secara totalitas yang saling terkait dalam menawarkan

pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Dengan bertitik tolak bahwa Islam dalam nilai-nilainya dan norma-normanya adalah sacral, maka Islamisasi ialah sakralisasi, atau kudusisasi (Zarkasyi, 2015).

Islamisasi merupakan sebuah program kerja yang sejatinya berusaha untuk merajut kembali puing-puing bangunan peradaban Islam, khususnya bangunan epistemology, yang didominasi oleh pandangan hidup (worldview) secular. Program kerja Islamisasi, sebagaimana yang al-Attas paparkan dalam presentasinya pada konferensi Islam sedunia pertama mengenai pendidikan (First World Conference on Muslim Education) yang diselenggarakan di Makkah pada tahun 1977 adalah: "...the liberation of man first from magical, mytological, animistic, national-cultural tradition opposed to Islam, and then from secular control over his reason and his language." Program ini mengidentifikasi artinya menemukan elemen-elemen asing termasuk konsep-konsep kunci yang bersemayam di dalam tubuh ilmu yang tidak sesuai dengan nilai dan ajaran Islam (un-islamic), misalnya: magik, mitos, animism, tradisi, dan budayam Bahasa, dan pikiran secular, kemudian mengisolasi dengan jalan membersihkan dan membebaskan elemen-elemen serta konsep-konsep kunci asing yang tersemat-semat tersebut. (Handrianto, 2019, hlm. 5)

Penting untuk dicatat bahwa proses kerja Islamisasi bukan sekadar transplantasi (menempelkan), bukan pula ayatisasi dan haditsisasi sebagai justifikasi dan pembenaran, tapi ia adalah integrase di mana nilai dan ajaran termasuk konsep-konsep kunci Islam yang telah diformulasi memberi corak dan warna terhadap disiplin ilmu.

Program kerja Islmisasi ilmu juga mengharuskan adanya formulasi nilai-nilai dan konsep-konsep kunci Islam. Dalam hal ini al-Attas menulis:

"Our next task will be the formulation and integration of the essential Islamic elements and key concetps so as to produce a composition which will comprise the core knowledge to be deployed in our educational system from the lower to the higher levels in respective gradatios designed to conform to the standard of each level....". (Al-Attas, 1995, hlm. 22)

Nampaknya al-Attas memberi petunjuk kepada kita tentang bagaimana cara kerja dan implementasi Islamisasi ilmu ini melalui karyanya Islam: The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality. Di sana al-Attas dengan rinci membahas konsep manusia (insan), agama (din), ilmu ('ilm and ma'rifah), kebijaksanaan (hikmah), adil ('adil) dana dab (ta'dib). Demikian pula, Islamisasi ilmu akan melahirkan keamanan, kebaikan dan keadilan bagi umat manusia. Pemikiran dari al-Attas meliputi dua aspek, yaitu: Pertama, Pandangan Tentang Epistemologi Islam. Al-Attas menjelaskan bahwa kemerosotan ilmu pengetahuan Islam terutama sekali berhubungan dengan epistemology. Problem umat Islam muncul ketika sains modern diterima di negara-negara Muslim modern, di saat kesadaran epistemologis Muslim amat lemah. Padahal epistemology Islam tidak berangkat dari keraguan, melainkan berangkat dari keyakinan akan adanya kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang sevara inheren telah terkandung dalam al-Qur'an sebagai petunjuk Tuhan. Bagi al-Attas sendiri, dalam proses pembalikan kesadaran epistemology ini, program Islamisasi menjadi satu bagian kecil dari upaya besar pemecahan masalah epistemology ilmu pengetahuan (Al-Attas, 2001).

Dewesternisasi adalah proses memisahkan dan menghilangkan unsur-unsur sekuler dan tubuh pengetahuan yang akan merubah bentuk-bentuk dan nilai-niali dari pandangan konseptual tentang pengetahuan seperti yang disajikan saat ini. Yang pada dasarnya upaya tersebut merupakan bentuk usaha pemurnian ajaran Islam dari segala pengaruh Barat. Upaya dewesternisasi ini sendiri tidak akan mempunyai signifikasi bagi umat Islam bila tidak dilanjutkan dengan gerakan Islamisasi (Kusuma & Muslih, 2023). Al-Attas mengoreksi disiplin ilmu-ilmu modern dan memurnikan ilmu-ilmu modern dan memurnikan ilmu-ilmu Islam yang telah tercelup dalam paham-paham sekuler. Perkembangan ilmu pengetahuan modern yang mengandung ideology sekularisme ini harus diformulasikan secara konseptual

melalui Islamisasi ilmu pengetahuan agar tidak terlepas dari nilai-nilai spiritualitas dan transendensi ketuhanannya.

Setelah kita mengetahui secara mendalam mengenai pandangan alam atau Islam dan Barat, maka proses Islamisasi baru bisa dilakukan. Oleh karena itu, metodologi yang digunakan oleh S.M.N. al-Attas dalam proses Islamisasi ilmu pengetahuan masa kini (*The Islamization of present-day Knowledge*), terdiri dua langkah atau proses yang saling berkaitan. Yaitu sebagai berikut: Pertama, Konsep-konsep kunci yang membentuk budaya dan peradaban Barat yang tidak sesuai dengan pandangan hidup Islam, atau disebut dengan *dewesternization*. Selain itu, ilmu-ilmu modern harus diperiksa dengan teliti. Ini mencakup metode, konsep, praduga, symbol dan ilmu modern; beserta aspek-aspek empiris dan rasional, dan yang berdampak kepada nilai dan etika, penafsiran historisitas ilmu tersebut, bangunan teori ilmunya, praduganya berkaitan dengan dunia, dan rasionalitas proses-proses ilmiah, teori ilmu tersebut tentang alam semesta, klasifikasinya, batasannya, hubungan dan kaitan dengan ilmu-ilmu lainnya serta hubungan dengan sosial harus diperiksa dengan teliti (Fadillah dkk., 2023).

Kedua, Memasukkan unsur-unsur (*elements*) Islam beserta konsep-konsep kunci dalam setiap bidang dan ilmu pengetahuan saat ini yang relevan. Jika proses tersebut selesai dilakukan maka Islamisasi akan membebaskan manusia dan *magic*, mitologis, animism, tradisi budaya nasional yang bertentangan dengan Islam, dan kemudian dari contoh *secular* kepada akal dan bahasanya. Islamisasi akan membebaskan akal manusia dari keraguan (*syakk*), dugaan (*dzann*) dan argumenasi kosong (*mira'*) menuju keyakinan akan kebenaran mengenai realitas spiritual, *intelligible* dan materi. Dengan dimasukkannya unsur-unsur serta elemen-elemen Islam tersebut, maka selanjutnya akan meubah tafsiran bentuk-bentuk, dan nilai-nilai konseptual isi pengetahuan (Mohammad Muslih dkk., 2022).

Worldview merupakan asas dalam menjalani kehidupan. Ketika seseorang memiliki cara pandang worldview Islam yang benar, maka orang itu akan benar perbuatannya, hal ini dibuktikan oleh para ulama terdahulu yang memiliki cara pandang yang sangat canggih dan komprehensif mengenai Islam, Pandangan alam dunia atau worldview Barat yang *human-centered* dan jauh dari nilai-nilai agama ditengarai menjadi sebab-musabab mengapa praksis pengembangan SDM saat ini menjadi begitu eksploitatif dan sarat akan nilai-nilai materialisme. Cara pandang saintifik (*scientific worldview*) (Alparslan Acikgenc, 1996, hlm. 5) dalam paradigma pengembangan SDM menghadirkan pembacaan realitas pekerjaan, lingkungan kerja, aktifitas kerja dan hubungan antara pekerja di sebuah institusi pendidikan hanya terbatas pada orientasi material dan duniawi semata, berikut dengan pengaruh yang muncul dari pandangan sempit tersebut. Pekerjaan tak lebih dari memenuhi intensi dan hasrat subyektif seseorang di kehidupan dunianya, menghempas tujuan agung seperti beribadah, bermanfaat bagi orang banyak, dan penyelesaian terhadap isu-isu sosial yang seharusnya menjadi concern bersama. Lingkungan kerja yang begitu keras mendorong jiwa-jiwa yang rakus, tamak, dan superior berkuasa dan penuh digdaya disamping keterbatasan wawasan religiusitas dalam implementasi kerja sehari-hari. Hubungan formal antara pekerja menyisakan *unhealthy relationship* dengan kamufase dan intrik-intrik yang mencerminkan kualitas hubungan yang rendah, minim kepercayaan, dan berpotensi menimbulkan konflik selama aktifitas kerja berjalan. Moralitas, etika, rasa hormat dan absensi spiritualitas dalam konteks dunia kerja direduksi menjadi intensi material semata, tujuan pendek demi keuntungan dan syahwat pribadi. Hal inilah menurut penulis, cara pandang materialisme terhadap kehidupan dunia menjadi refleksi dari permasalahan cara pandang dalam pengembangan SDM dewasa ini

3.2. Problem politik barat dan solusi

Desakralisasi politik menjadi dimensi penting sekularisme yang merupakan hasil dari proses adanya sekularisasi. Pada tahap ini, politik dijauhkan dan dikosongkan dari nilai-nilai agama. Langkah ini berdampak besar pada kehidupan sosial dan bahkan membuat politik berjalan tanpa nilai-nilai agama. Apabila standar dan aturan penafsiran Barat diberlakukan, al-Attas melihat pengetahuan dan Islam dikecewakan dan didesakralisasi. Sehingga yang terjadi adalah praktik politik dengan nilai-nilai materialis (Latief, Rizqon, dkk., 2022).

Ajaran agama bersifat sakral karena merupakan ajaran dari Tuhan. Berbeda dengan tuntunan yang merupakan produk kecerdasan manusia hanya bersifat luhur dan profane tetapi tidak sampai sakral. Desakralisasi ajaran agama, adat, secara tidak sadar akan berdampak pada kelestarian hidup alam semata. Gagasan bahwa otoritas agama dan politik (gereja dan negara) merupakan dua entitas yang berbeda dan bahwa keduanya dapat dan harus dipisahkan merupakan gagasan yang asal-usulnya dapat dikaitkan dengan doktrin yang menyatakan: “Render therefore unto Caesar the things which are Caesar’s and unto God the things that are God’s”. Gagasan ini dikonfirmasi oleh berbagai pengalaman historis kaum Kristen awal dan perkembangan dunia Kristen di masa-masa selanjutnya (Kusuma, 2022).

Terdapat tiga komponen penting dalam Alkitab yang menjadi kerangka dasar kepada sekularisasi, yaitu: disenchantment of nature; yang dikaitkan dengan penciptaan (creation), desacralization of politics; dengan migrasi besar-besaran (exodus) kaum Yahudi dari Mesir dan deconsecration of values; dengan perjanjian Sinai (Sinai Covenant). Dengan menjustifikasikan sekularisasi berasal dari ajaran Alkitab, Cox menyimpulkan bahwa sekularisasi adalah konsekuensi sah dari kepercayaan Kristiani (Al-Attas, 2013).

Berfokus kepada aspek sekularisasi dalam desacralization of politics, unsur-unsur agama dan rohani harus disingkirkan dari politik. Al-Attas mengamati bahwa politik di Barat telah kehilangan asal-usul sakralnya. Baginya desakralisasi politik berarti penghapusan legitimasi sakral kekuasaan dan otoritas politik, yang merupakan prasyarat perubahan politik dan karenanya juga perubahan sosial yang memungkinkan munculnya proses sejarah. Oleh sebab itu, peran agama (termasuk wahyu) dalam institusi politik harus disingkirkan. (Muhammad Syifa’urrahman & Amir Reza Kusuma, 2022). Ini menjadi syarat untuk melakukan perubahan politik dan sosial. Segala macam kaitan antara kuasa politik dengan agama dalam masyarakat tidak boleh berlaku karena dalam masyarakat secular, tidak seorang pun memerintah atas otoritas kuasa suci (Kusuma, 2023).

Sekularisasi sebenarnya merupakan pergulatan antara rasionalitas dan kuasa gereja dalam peradaban Barat. (Muslih dkk., 2021) Akibat pergulatan yang panjang dan dahsyat ini akal bawah sadar masyarakat Barat telah terpatrit dengan kesimpulan bahwa pemerintahan agama hanya akan berdampak kemunduran. Bentuk pemerintahan secular, liberal, dan pluralis adalah satu-satunya solusi agar tidak terjadi lagi pemerintahan despotic dan authoritarian. (Latief dkk., t.t.) Maka sekularisasi itu sekarang memperoleh makna yang konkrit, yaitu desakralisasi terhadap segala sesuatu selain hal-hal yang benar-benar bersifat Ilahi (transcendental), yaitu dunia ini. Dalam buku yang berjudul *What When Wrong*, Bernard Lewis mencatat bahwa (Husaini, 2017) “Alasan sebenarnya kenapa umat Islam tidak mengembangkan gerakan sekulernya sendiri tajam terdapat usaha-usaha untuk memperkenalkan gerakan sekularisasi dari luar, terlihat jelas dari perbedaan-perbedaan mencolok antara sejarah dan pengalaman umat Kristen dan Islam, sejak awalnya umat Kristen diajari lewat dua hal anggapan dan praktik untuk membedakan antara Tuhan dan Kaisar serta antara tugas-tugas berbeda pada masing-masing dari kedua pihak itu. Sedangkan, umat Islam tidak pernah menerima perintah seperti itu”. Bernard Lewis telah mencoba menemukan penyebab kemunduran Islam. Dia mengatakan bahwa sebelum renaissance Barat telah berkembang begitu banyak sehingga mereka telah melangkah sangat jauh secara ekonomi, militer, dan budaya. Di era abad ke-20

jelas di Timur Tengah dan negara-negara Muslim menjadi miskin, lemah. Pada abad yang sama, kekuatan dan otoritas yang muncul dari orang-orang Kristen dan barat menyerang Muslim sepenuhnya dan kehidupan pribadi mereka. Ini menjadi alasan untuk mencari dan tentang anti-barat dan anti-Amerika di Timur Tengah. Lewis telah mencoba menemukan penyebab kemunduran Islam.

Gagasan pemisahan gereja dan negara tampaknya muncul di negara-negara Protestan di Eropa Utara, dan untuk pertama kalinya diberi kekuatan legal dan konstitusional di Amerika Serikat (abad ke-18). Dalam surat yang ditulis untuk pemimpin komunitas Yahudi di Newport, Rhode Island, pada 1790, George Washington menjelaskan prinsip yang terkandung dalam negara yang baru berdiri :

“The citizens of the United States of America...all possess alike liberty of conscience and immunities of citizenship. It is now no more that toleration is spoken of, as if it was by the indulgence of one class of people that another enjoyed the exercise of their inherent natural rights. For happily the government of the United States, which gives to bigotry no sanction, to persecution, should demean themselves as good citizens, in giving it on all occasions their effectual support.”

Amerika Serikat dapat dipandang sebagai model negara sekuler (secular state) par excellence. Sebuah negara sekular mengasumsikan pemisahan agama dan politik (separation of religion and politics) secara total; agama menjadi semata-mata urusan pribadi, dan politik tidak dipengaruhi oleh agama; agama tidak boleh masuk wilayah politik, dan negara tidak bisa mengontrol agama (keyakinan). Lebih dari itu Protestan Evangelis Amerika juga telah menjadi kekuatan inspiratif dalam kehidupan politik Amerika. Ia telah menjadi factor yang signifikan untuk menumbuhkan semangat anti-perbudakan di bagian utara Amerika, menjelang pecahnya Perang sipil tahun 1861. Namun, ironisnya, Protestan Evangelis juga memperkuat komitmen penduduk di bagian selatan untuk mempertahankan sistem ekonomi yang melegalkan perbudakan. Dalam hal ini, agama dalam negara sekuler seperti di Amerika masih tetap muncul di ranah public, di mana agama digunakan untuk kepentingan politik dalam pemilu. Ini juga menunjukkan bahwa betapa sentiment agama dalam masyarakat Amerika sekuler juga masih begitu efektif digunakan untuk kepentingan politik tertentu. (Wan Mohd Nor Wan Daud, 1997, hlm. 9)

Menurut Harvey Cox, berhadapan dengan sekularisasi, Gereja perlu bersikap terbuka. Keterbukaan sikap Gereja ini terutama menyangkut perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Ia tidak setuju dengan teologi sejarah (theolog of history) yang telah dikemukakan oleh para teolog, dan ia menawarkan teologi perubahan sosial (theology of social change). Dengan kata lain, ia tidak perlu melulu setiap bidang dikaitkan dengan agama, sehingga Gereja mendukung dengan tindakan-tindakan yang nyata (Cox, 2013).

Lebih dari itu, di negara sekuler juga tampaknya bukan berarti agama sama sekali tidak dijadikan landasan dalam kegiatan public seperti dalam kegiatan politik dan ekonomi. Nilai-nilai semisal kebebasan, hak asasi individu, dan tertib hukum merupakan nilai-nilai politik yang diambil oleh masyarakat Barat di negara-negara sekuler dari tradisi agama Kristen Protestan yang telah diuniversalisasikan. Terlepas dari karakter sekuler Amerika, agama dalam pengertian yang luas terbukti secara empiris menjadi factor penting dalam perpolitikan dan kehidupan rakyat Amerika, terutama dalam mempengaruhi perilaku memilih (voting behavior), sebagaimana dibuktikan dengan cukup baik oleh studi-studi yang terangkum dalam buku berjudul, *Rediscovering the Religious Factor in America Politics* (David C. Legee and Lyman A. Kellstedt (eds): 1993). Temuan ini dapat dijadikan acuan untuk memahami posisi agama dalam politik di negara secular lain seperti di Indonesia. Sekalipun mungkin bisa diperdebatkan, dapat dikatakan bahwa sekularisasi politik tidak niscaya menyebabkan masyarakat menjadi ateistik dan anti-agama. Sebaliknya, religiositas dan kehidupan spiritual

yang lebih tinggi dapat dicapai dengan sekularisasi politik, karena agama tidak disibukkan dengan perebutan atau pertarungan politik (Mahmudi dkk., t.t.).

Terjadinya penghapusan legitimasi sacral kekuasaan politik, sebagaimana dipraktikkan oleh Kristen Barat di masa lalu yang menganggap kekuasaan politik sebagai warisan Tuhan sehingga ada dogma yang menyatakan bahwa mengkhianati penguasa berarti mengkhianati Tuhan. Hal itu lah yang mendorong lahirnya sekularisme dengan desakralisasi politik sebagai salah satu komponennya yang menghapus legitimasi sacral politik sebagai prasyarat untuk terjadinya perubahan politik yang selanjutnya akan mendorong terjadinya perubahan sosial lalu kemudian diakhiri dengan perubahan sejarah. Karena sejarah menurut sekularisme adalah rekayasa dan perencanaan manusia tanpa adanya campur tangan Tuhan di dalamnya. Maka tentu yang namanya rekayasa perlu kepada scenario yang matang, dan desakralisasi politik ini adalah salah satu dari scenario pembentukan sejarah versi manusia.

Kondisi yang serba dilematis itulah yang sebenarnya sangat penting untuk melacak kembali dasar lahirnya agama di dunia. Secara historis, lahirnya agama di dunia memang didasari atas kondisi masyarakat yang serba chaotic. Agama sebenarnya menjadi dasar kuat untuk melakukan reorganisasi ulang terhadap kehidupan masyarakat tersebut dengan menjadikan nilai dan norma agama sebagai dasar pembangunan masyarakat. Konteks itulah yang mendorong adanya kemudian ditempatkan juga menjadi agama sosial. Pemaknaan agama sebagai entitas profetik memiliki esensi pembebasan dalam membebaskan masyarakat dari pembodohan maupun kemungkaran (Amir Reza Kusuma & Didin Ahmad Manca, 2022).

Sebagaimana dikatakan Samuel P. Huntington, bahwa saat ini tengah terjadi gelombang demokratisasi ketiga di dunia., setelah sebelumnya terjadi gelombang pertama tahun 1922 dan ketiga tahun 1950-an. Gelombang ketiga itu diawali dengan runtuhnya rezim Faris di Portugal pada tahun 1974, dan mencapai puncaknya dengan runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan Tengah pada akhir 1989. Itu menunjukkan kemenangan bagi liberalisasi ekonomi dan politik, dan bahkan kemenangan bagi demokrasi. Dalam setengah abad terakhir ini, demokrasi dalam pengertian modern telah memperoleh kekuatan hamper universal sebagai ide politik, sebagai sebuah inspirasi dan sebuah ideology.

Interaksi antar manusia membutuhkan simbol. Simbol tersebut merupakan hasil kesepakatan orang-orang yang terlibat dalam interaksi sehingga aman dan damai. Namun seringkali orang berhenti pada simbol tanpa memahami maknanya. Dibutuhkan teori politik identitas karena manusia adalah satu-satunya aktor atau aktor politik yang mengorganisir organisasi setiap hari dalam kehidupan. Sebenarnya kecenderungan manusia memasukkan seseorang atau kelompok ke dalam kategori tertentu sebagai tujuan bertahan hidup di dunia ini. Mengelompokkan individu atau kelompok ke dalam kategori selalu menimbulkan stereotip yang tidak selalu benar dan sering menyesatkan karena dibentuk atas dasar tidak lengkap, sepihak dan sering menyesatkan, sepihak dan disaring dan diserap oleh individu dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda (Latief, Zarkasyi, dkk., 2022b).

3.3. Pendidikan Politik islam sebagai kritik politik barat

Agama memiliki nilai-nilai sakralitas dengan batasan-batasan doktrin normative yang harus dipatuhi. Sebaliknya, politik memiliki nilai-nilai profanitas yang memberi ruang otoritas bagi manusia untuk mengekspresikan ide dan gagasan sesuai kepentingannya. Perkembangan agama, budaya, dan politik selalu berkaitan dengan peran negara. Sejak dahulu hingga saat ini di berbagai wilayah masih berlangsung, negara diperankan oleh kekuatan suku dan dinasti. Terhadap eksistensi agama, negara bisa berperan sebagai pendukung dan pelindung, namun juga sebagai penghalang dan penindas (Fadillah dkk., 2022).

Di samping itu, Jose Casanova yang menyatakan bahwa teori-teori sekularisasi tersebut tidak dapat menjelaskan perkembangan agama secara diam-diam menguat menjadi publik

pada tahun 1980-an yang membantah dugaan mereka bahwa agama akan mengalami degradasi dan pribatisasi telah tampak problematis. Kemudian ia memunculkan tiga konotasi berbeda mengenai sekularisasi. Pertama, sekularisasi sebagai decline of religious beliefs and practices (kemunduran kepercayaan dan praktik keagamaan). Kedua, sekularisasi sebagai privatization of religion (privatisasi agama). Ketiga, sekularisasi sebagai differentiation of the secular spheres (pemisahan agama dari dunia sekuler, seperti negara, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Menurut Casanova, kita menyaksikan "perampasan" agama di dunia modern yang berarti bahwa tradisi agama di seluruh dunia menolak untuk menerima peran marjinal dan privatisasi yang disediakan oleh teori modernitas, serta teori sekularisasi, untuk mereka. Salah satu hasil dari kontestasi ini adalah "proses repolitisasi bidang agama dan moral pribadi dan renormativisasi bidang ekonomi dan politik publik"

Senada dengan kritik terhadap deskralisasi atau sekularisasi politik di atas, Peter Berger yang pada 1960-an meramalkan kematian agama-agama tradisional pada akhir abad ke-20 mengubah pandangannya sepenuhnya pada tahun 1997, hanya beberapa tahun sebelum tenggat waktunya: (Berger, 1998)

"I think what I and most other sociologists of religion wrote in the 1960s about secularization was a mistake. Our underlying argument was that secularization and modernity go hand in hand. With more modernization comes more secularization. It wasn't a crazy theory. There was some evidence for it. But I think it's basically wrong. Most of the world today is certainly not secular. It's very religious."

Orang dapat melihat teori sekularisasi sebagai produk dari milieu sosial dan budaya dari mana ia muncul. Hadden menganggap sekularisasi sebagai "konsep berorientasi yang didasarkan pada preferensi ideologis daripada teori sistematis". Menurutnya, teori sekularisasi sudah sangat lama tidak tertandingi dan belum mengalami pengawasan sistematis karena itu adalah "doktrin lebih dari itu adalah teori", "ideologi yang diterima begitu saja daripada seperangkat proposisi sistematis yang saling terkait". Faktanya, "sekularisasi lebih dari sekadar diterima begitu saja; the idea of secularization became sacralized." Dia berpendapat bahwa "kepercayaan pada sekularisasi telah ditopang oleh antagonisme yang mendalam dan abadi terhadap keyakinan agama dan berbagai ekspresi agama yang terorganisir".

Teori-teori sekularisasi di atas, mendapat kritik yang cukup tajam dari David Martin. Ia adalah sosiolog kontemporer pertama yang menolak pada tahun 1965 tesis sekularisasi secara langsung, bahkan mengusulkan agar konsep sekularisasi dihilangkan dari wacana ilmiah sosial dengan alasan bahwa itu hanya melayani fungsi ideologis dan polemik, bukan teoretis, dan karena tidak ada bukti yang mendukung "pergeseran dari periode agama dalam urusan manusia ke periode sekuler". Dapat disimpulkan bahwa pandangan sekularisme adalah bentuk balas dendam Barat atas perkembangan kegaduhan gereja yang mematikan. Jadi sekularisasi agama dan alam, agama dan politik, serta agama dan nilai-nilai tidak menjadi masalah selama untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat bertentangan dengan Islam. Jadi konsep integrasi Tauhidi dalam Islam adalah elemen dasar yang sangat ditakuti (Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, 2022).

Pandangan tersebut dikritik oleh al-Attas yang mengatakan sekalipun Cox membedakan antara sekularisasi dengan sekularisme, namun pada akhirnya sekularisasi juga akan menjadi sekularisasionisme. Maka dapat disimpulkan bahwa, Sekularisasi dan sekularisme sama-sama memiliki persamaan, yaitu relativisme sejarah yang sekuler. Sedangkan dalam sekularisasi politik Madjid terpengaruh oleh Arkoun. Ia menganggap bahwa Negara Madinah pimpinan Nabi adalah model hubungan antara agama dan negara dalam Islam yang ide pokoknya adalah adanya suatu tatanan sosial politik yang diperintahkan tidak oleh kemauan pribadi, melainkan atas dasar kesepakatan konstitusi. Ia menyimpulkan bahwa Islam

menghendaki tatanan sosial-politik atau negara dan pemerintahan ialah apa yang dikehendaki oleh ide-ide modern tentang negara dan pemerintahan, yang pokok pangkalnya ialah menurut peristilahan kontemporer egalitarianism, demokrasi, partisipasi, dan keadilan sosial. Maka dapat disimpulkan dari semua yang tersebut di atas, politik Islam berbanding terbalik dengan politik yang ada di Barat (Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 2015).

Konsep desakralisasi politik yang disampaikan Madjid tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Islam yang memandang agama sangat berperan dalam hal pemerintahan dan kepemimpinan. Dalam Islam, seperti yang diungkapkan al-Attas, kekuasaan politik didasarkan atas kuasa Ilahi dan kuasa suci Rasulullah yang merefleksikan kuasa Tuhan. Desakralisasi politik jelas menafikan peran ulama yang beriwibawa dalam sistem pemerintahan, sekaligus menceraikan Islam dari politik dengan menghalangi penyebaran pandangan hidup Islam dalam masyarakat. Akibatnya agama menjadi urusan pribadi bukan publik.

Maka dari itu, langkah yang harus diambil adalah hendak masyarakat harus bisa menjadi dewasa, kritis, memahami arti beragama. Agama adalah tempat benih-benih spritualitas manusia disemai dan merupakan perkara suci dan sacral, bukan untuk kepentingan politik. Kritik dalam hal ini bisa direposisi dalam ranah politik. Artinya, penyimpangan politik dengan agama harus dikritisi dan dimunculkan gerakan pengemabalian agama pada status quo asalnya yang sacral sebagai antitesisnya.

Dengan latar belakang seperti itu, lebih dari wajar jika para pemimpin politik mencoba melegitimasi kekuasaan mereka melalui seruan agama. Sakralisasi politik bukanlah fenomena baru. Dimensi agama dalam politik terungkap dalam rezim totaliter dan demokratis karena sakralisasi politik berfungsi baik sebagai instrumen untuk kepatuhan massa kepada pemimpin dan ideologinya serta sarana untuk memastikan koherensi dan kelanjutan identitas kolektif. Konsep Sakralisasi politik telah lama diadopsi sebagai konsep heuristik untuk menganalisis bagaimana mayoritas dimobilisasi oleh rezim politik yang secara sistematis mempraktikkan kekerasan politik dan penganiayaan terhadap perbedaan pendapat.

Sakralisasi politik mengacu pada keselarasan tertentu antara bidang politik dan moral atau agama. Dalam pengertian ini, ini adalah proses politik di mana gagasan 'sakral' bermetamorfosis dari yang secara eksklusif ilahi menjadi gagasan sinkretis, 'menggantikan' agama tradisional dan mereproduksi klaimnya atas kebenaran absolut. Menurut Linz, proses ini berbeda dengan promosi seruan agama untuk tujuan politik dan politisasi agama. Akibatnya, dimensi seperti agama terbentuk dalam politik yang berbeda dan otonom dari lembaga keagamaan tradisional. Ketika politik disakralkan, ia mengasumsikan karakter misionaris yang membutuhkan kesetiaan yang kurang lebih tidak perlu dipertanyakan lagi dari para pengikutnya (Ihsan dkk., 2022).

Pemahaman yang benar tentang unsur-unsur fundamental dari visi politik Islam adalah prasyarat untuk pengembangan politik Islam. Itu dimulai dengan mengedepankan pemahaman konseptual tentang elemen-elemen mendasar ini yang meliputi manusia alami, alam semesta, dan konsep din. Ketika cendekiawan Muslim berbicara tentang Politik Islam atau sistem politik Islam, hingga politik barat kontemporer, beberapa ide dan konsep dasar mungkin tampak kontradiktif atau setidaknya, tidak berarti. Gagasan bahwa agama dapat menentukan kegiatan politik akan dianggap tidak koheren dan emosional oleh mayoritas politik barat kontemporer. Hal ini karena di Barat, seperti dikutip Watt, agama kepada Occident:

“...means a way of spending an hour or so on Sundays in practices which give him some support and strength in dealing with the problems of daily life, and which encourages him to be friendly towards other persons and to maintain the standards of sexual propriety; it has little or nothing to do with commerce or economics or politics or industrial relationship... or

may even look on religion as an opiate developed by exploiters of the common people in order to keep them in subjection”.

Pemahaman agama ini belum tentu diterima atau berlaku untuk semua masyarakat dan peradaban terkhusus oleh masyarakat Islam. Ini adalah deskripsi tentang pengalaman dan sejarah kekristenan barat. Dalam Islam, dikotomi dan pemisahan "agama" dari aspek kehidupan lain inilah yang kontradiktif, tidak koheren, dan tidak berarti. Sebab "agama" dalam Islam, sebagaimana dipahami oleh para sarjana Islam dan berdasarkan sumber pengetahuannya sendiri, tidak dapat disamakan dengan konsep agama seperti yang dipahami di barat saat ini.

3.4. Worldview Islam pondasi pendidikan politik

Worldview merupakan asas dalam menjalani kehidupan. Ketika seseorang memiliki cara pandang *worldview Islam* yang benar, maka orang itu akan benar perbuatannya, hal ini dibuktikan oleh para ulama terdahulu yang memiliki cara pandang yang sangat canggih dan komprehensif mengenai Islam, selain itu Ada banyak cara dan trik manusia memandang dan mensikapi apa yang terdapat dalam alam semesta bersumber dari beberapa faktor yang dominan dalam kehidupannya. Faktor itu boleh jadi berasal dari kebudayaan, filsafat, agama, kepercayaan, tata nilai masyarakat atau lainnya. Luasnya spektrum pandangan manusia tergantung kepada faktor dominan yang mempengaruhinya. Cara pandang yang bersumber pada kebudayaan memiliki spektrum yang terbatas pada bidang-bidang tertentu dalam kebudayaan itu (Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, 2022).

Cara pandang yang berasal dari agama dan kepercayaan akan mencakup bidang-bidang yang menjadi bagian konsep kepercayaan agama itu. Ada yang hanya terbatas pada kesini-kinian, ada yang terbatas pada dunia fisik, ada pula yang menjangkau dunia metafisika atau alam diluar kehidupan dunia (Zarkasyi, 2013, hlm. 2).

Terma yang dipakai secara umum untuk cara pandang ini dalam bahasa Inggris adalah worldview (pandangan hidup) atau dalam bahasa Jerman adalah weltanschauung (filsafat hidup) atau weltansicht (pandangan dunia). Sebenarnya istilah umum dari worldview hanya terbatas pada pengertian ideologis, sekuler, kepercayaan animistik, atau seperangkat doktrin-doktrin teologis dalam kaitannya dengan visi keduniaan. Artinya worldview dipakai untuk menggambarkan dan membedakan hakekat sesuatu agama, peradaban atau kepercayaan. Terkadang ia juga digunakan sebagai metode pendekatan ilmu perbandingan agama (Latief, Rizqon, dkk., 2022).

Kita perlu memahami bahwa Islam = agama dan peradaban, Din= susunan kekuasaan, struktur hukum dan kecenderungan manusia untuk membentuk masyarakat yang mentaati hukum dan mencari pemerintah yang adil. Madinah= Tempat Din Madana= Berbudaya, beradab. Tamadun=Peradaban, Tamadun dan ,adaniyat Iran Medeniyet Turki

Pembahasan mengenai worldview memang sudah banyak dikaji oleh beberapa penulis, namun di sini peneliti hanya merujuk kepada tulisan Hamid Fahmy Zarkasyi, menurutnya dalam beberapa karya dan penjelasannya terdapat agama dan peradaban yang memiliki spectrum pandangan yang lebih luas dari sekedar visi keduniaan maka makna pandangan hidup diperluas. Worldview diambil dari Jerman, Weltanschauung. Karena dalam kosa kata bahasa Inggris tidak terdapat istilah yang tepat untuk mengekspresikan visi yang lebih luas dari sekedar realitas keduniaan selain dari kata-kata worldview, maka cendekiawan Muslim mengambil kata-kata worldview (untuk ekspresi bahasa Inggris) untuk makna pandangan hidup yang spektrumnya menjangkau realitas keduniaan dan keakhiratan dengan menambah kata sifat Islam (Zarkasyi, 2012, hlm. 40).

Sejatinya, pembahasan mengenai worldview Islam, tauhid (bertuhan kepada Allah) menjadi basisnya. Dalam pandangan Syed Muhammad Naquib al-Attas worldview Islam

tidak terpisah dunia fisik dan dunia non-fisik, dua hal tersebut saling berelasi, serta memiliki hubungan erat antara aspek keduniaan dan ukhrawi. Dalam artian worldview Islam menghubungkan hal yang terlihat dengan hal tak terlihat mengenai realitas. Mengetahui pengetahuan metafisik paling ditekankan karena dapat membersihkan kebingungan, keraguan, dan menetapkan kebenaran tentang keberadaan. Adapun sumber worldview Islam dinyatakan lengkap secara teks dan komprehensif, serta dapat memberikan interpretasi yang jelas dan mendalam tentang kebenaran sesungguhnya yaitu kebenaran realitas fisik dan kebenaran realitas metafisik. Dengan demikian worldview Islam lebih bersifat komprehensif dan sumbernya otoritatif untuk mengungkapkan realitas yang sebenarnya.

Secara konsep, para ulama' memberikan pandangan mengenai konsep worldview Islam. Bagi al-Maududi worldview Islam dijelaskan dalam istilah "Nazariyah Islāmiyyah", maksudnya pandangan hidup diawali dengan konsep keesaan Tuhan yang mempengaruhi seluruh aktifitas dan kegiatan kehidupan manusia di dunia. Sebab mengakui Allah sebagai Tuhan merupakan moral tertinggi yang mendorong manusia untuk melaknakan kehidupan secara menyeluruh. Walaupun al-Maududi sudah menjelaskan maksud worldview Islam dengan konsep syahadahnya, tetap terdapat kekurangan yaitu penggunaan kata nazariyyah artinya teori. Sedangkan al-Attas mengkritik bahwa worldview Islam bukan teori, karena teori bisa digugurkan atau diganti, konsekuensinya pandangan hidup Islam mengenai syahadah bisa diganti ketika ada konsep tandingannya, serta teori hanya sebatas kebenaran objektif yang bersifat fisik dan tidak mampu mengungkapkan realitas metafisik. Worldview Islam juga menggabungkan antara dunia dan akhirat dimana aspek dunia tidak bisa dipisahkan dengan akhirat (Abu al-Ala al-Maududi, 1982).

Islam sendiri memandang politik tidak sedemikian rupa. Ketika Cristianiy memiliki trauma mendalam terhadap otoritas Gereja yang cums sebagai Kerajaan yang berfungsi untuk bermain politik. Dengan dasar-dasar kekristenan memiliki masalah teologis, sedangkan Islam sendiri tidak memiliki itu. Bahkan Islam tidak diperintahkan untuk memisahkan otoritas agama dan politik. Menurut Al-Attas, Islam juga menerapkan penghapusan kesucian politik yang terkait dengan agama atau pemerintahan siapa pun. Namun, maknanya di sini adalah, Islam didasarkan pada otoritas hukum Allah, hukum yang diwahyukan oleh Allah SWT., dan Sunnah Rasulullah SAW. dan hukum yang diwahyukan oleh Allah SWT. dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. adalah ajaran yang diikuti oleh para pengikut Islam. Dengan demikian, seluruh umat Islam menjauhkan diri dari legitimasi atau sakralisasi politik, agama atau pemerintahan apapun yang tidak sesuai dengan syariat dan Sunnah.

Di zaman modern, kekuatan suku dan dinasti sebagian besar telah digeser oleh negara yang sebagian merupakan sistem demokrasi. Fenomena nasionalisme yang muncul di zaman modern menampilkan karakter dan wajah yang tidak berpolitik. Hubungan antara Islam dan demokratisasi adalah elemen yang sangat penting dalam dinamika politik dunia Muslim kontemporer. Hukum politik yang muncul dari konteks Al-Qur'an dan Sunnah, bagaimanapun, bukanlah ilusi; sebaliknya, ini sangat jelas dan konkret karena menguraikan skema politik yang dapat diwujudkan setiap saat dan dalam semua kondisi kehidupan manusia. Dalam Islam, berbicara tentang demokrasi dan konsep partisipasi demokratis bukan berarti kata demokrasi adalah istilah Al-Qur'an yang dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Apa artinya sebenarnya adalah bahwa; (a) warisan Islam mengandung konsep dan gambar kunci yang merupakan dasar persepsi Islam tentang demokrasi dan (b) fitur dan nilai-nilai positifnya (misalnya, supremasi hukum, tanggung jawab pemerintah, kesejahteraan umum, kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia) kompatibel dengan ajaran Islam.

Berbeda dengan demokrasi, Fazlur Rahman mementingkan syura' dalam memberikan kedaulatan pada rakyat melalui wakil-wakilnya dalam negara Islam. Namun dalam tahap prosesnya, yang membedakan adalah dimana demokrasi berlandaskan pada suara terbanyak,

sedangkan syura tetap berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah. Pendapatnya mengenai negara pun harus sebagaimana dicontohkan pada masa para sahabat. Setelah dipilihnya pengganti, pemimpin melakukan syura dengan orang-orang yang diberi kepercayaan oleh umat yang mana hasil dari syura tersebut kembali lagi pada umat. Di sana lah syura berperan penting dalam menentukan pilihan umat tentang orang yang dianggap paling layak menjabat sebagai pemimpin. Meskipun demikian secara praktis antara demokrasi dan syura dapat seiring dan sejalan.

Secara umum, gagasan politik Islam adalah sintesis dari konsep kepemimpinan yang populer di masyarakat Arab pra-Islam itu sendiri, seperti di Mesir, Suriah, Mongol, dan Persia. Dengan demikian, wacana untuk memisahkan Islam dari politik akan menghambat peran pandangan Islam tentang kehidupan yang tersebar di masyarakat dan menjadikan urusan agama sebagai individu daripada publik. Bahkan Islam adalah satu-satunya agama yang sangat serius dan peduli dengan politik, bukan hanya untuk hal-hal tetapi untuk mencapai kemuliaan dan kebahagiaan dunia dan akhirah (Zaid dkk., 2023).

4. KESIMPULAN

Desakralisasi politik menjadi dimensi penting sekularisme yang merupakan hasil dari proses adanya sekularisasi. Pada tahap ini, politik dijauhkan dan dikosongkan dari nilai-nilai agama. Langkah ini berdampak besar pada kehidupan sosial dan bahkan membuat politik berjalan tanpa nilai-nilai agama. Apabila standar dan aturan penafsiran Barat diberlakukan, al-Attas melihat pengetahuan dan Islam dikecewakan dan didesakralisasi. Sehingga yang terjadi adalah praktik politik dengan nilai-nilai materialis.

Islamisasi merupakan sebuah program kerja yang sejatinya berusaha untuk merajut kembali puing-puing bangunan peradaban Islam, khususnya bangunan epistemology, yang didominasi oleh pandangan hidup (worldview) secular. Program kerja Islamisasi, sebagaimana yang al-Attas paparkan dalam presentasinya pada konfrensi Islam sedunia pertama mengenai pendidikan (First World Conference on Muslim Education) yang diselenggarakan di Makkah pada tahun 1977 adalah: "...the liberation of man first from magical, mytological, animistic, national-cultural tradition opposed to Islam, and then from secular control over his reason and his language." Program ini mengidentifikasi artinya menemukan elemen-elemen asing termasuk konsep-konsep kunci yang bersemayam di dalam tubuh ilmu yang tidak sesuai dengan nilai dan ajaran Islam (un-islamic), misalnya: magik, mitos, animism, tradisi, dan budayam Bahasa, dan pikiran secular, kemudian mengisolasi dengan jalan membersihkan dan membebaskan elemen-elemen serta konsep-konsep kunci asing yang tersemat-semat tersebut.

Desakralisasi politik tidak dapat diterima karena bertentangan denngan Islam yang memandang agama sangat berperan dalam hal pemerintahan dan kepemimpinan. Dalam Islam, seperti yang diungkapkan al-Attas, kekuasaan politik didasarkan atas kuasa Ilahi dan kuasa suci Rasulullah yang merefleksikan kuasa Tuhan. Desakralisasi politik jelas menafikan peran ulama yang beriwibawa dalam sistem pemerintahan, sekaligus menceraikan Islam dari politik dengan menghalangi penyebaran pandangan hidup Islam dalam masyarakat. Akibatnya agama menjadi urusan pribadi bukan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, R, Amir Reza Kusuma, M. A. F. (2022). The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education. *Jurnal Dialogia*, 20(1), 176–205. <https://doi.org/DOI: 10.21154/dialogia.v20i1.3533>

- Abu al-Ala al-Maududiy. (1982). *Nadzariatu al-Islam as-Siyasiy*. Daru al-Fikir.
- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. ISTAC.
- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to The Metaphysics of Islam: An Exposition of The Fundamental Element of The Worldview of Islam*. ISTAC.
- Al-Attas, S. M. N. (2001). *Risalah Untuk Kaum Muslimin*. ISTAC.
- Al-Attas, S. M. N. (2013). *Islam Faham Agama dan Asas Akhlak*. IBFIM.
- Amir Reza Kusuma & Didin Ahmad Manca. (2022). Pendekatan Kecerdasan Emosional Dalam Pembelajaran Daring Bahasa Arab. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(3), 115–122. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v1i3.653>
- Berger, P. L. (1998). *The Desecularization of The World_ Resurgent Religion and World Politics*. Ethics and Public Center Publishing Company.
- Cox, H. (2013). *The Secular City*. Princeton University Press.
- Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & Anwar, R. A. (2022). Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6837>
- Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & Rajab al-Lakhm, N. R. (2023). The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 7(1), 25–62. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v7i1.8456>
- Handrianto, B. (2019). *Islamisasi Sains: Sebuah Upaya Mengislamkan Sains Barat Modern*, (: S, Cet. 2), 61. Institute for the Study Islamic Thought and Civilization INSIST.
- Husaini, A. (2017). Bernard Lewis dan Apologia Barat. *TSAQAFAH*, Query date: 2022-06-18 06:20:56. <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/975>
- Ihsan, N. H., Khoerudin, F., & Kusuma, A. R. (2022). Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme. *Journal for Islamic Studies*, 5(4), 18. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323>
- Kusuma, A. R. (2022). Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 30. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>
- Kusuma, A. R. (2023). *Psikologi Islam, Membaca Anatomi Pemikiran Konsep Psikologi Syed Muhammad Naquib al-Attas*. Gaza Library Publishing.
- Kusuma, A. R., & Muslih, M. (2023). *Problem Ekonomi Secular dan Respon Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam Pandangan Islam*. 9(1), 963–972. <https://doi.org/DOI : 10.29040/jiei.v9i1.8369>

- Latief, M., Ash-Shufi, C. G. F., Kusuma, A. R., & Fadhlil, F. D. (t.t.). *Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy*. 7(1), 14. <https://doi.org/DOI :10.15575/jaqfi.v7i1.12095>
- Latief, M., Rizqon, A., Kusuma, A. R., & Kubro, S. (2022). The Problem of Religious Freedom In the Practice of Amar Ma'ruf Nahi Munkar. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 22(1), 95–110. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12274>
- Latief, M., Zarkasyi, A. F., & Kusuma, A. R. (2022b). *Problem Sekuler....* 7. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2542>
- Mahmudi, I., Athoillah, M. Z., Wicaksono, E. B., & Kusuma, A. R. (t.t.). *Taksonomi Hasil Belajar Menurut Benyamin S. Bloom*. 8.
- Mas'ud, F. (2018). *Manajemen bisnis berbasis Pandangan Hidup Islam, Islamic Worldview Based Business Management*,. UNDIP Press.
- Mohammad Muslih, Heru Wahyudi, & Amir Reza Kusuma. (2022). Integrasi Ilmu dan Agama menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Ian G Barbour. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 13(1), 21–35. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/>
- Muhammad Syifa'urrahman & Amir Reza Kusuma. (2022). قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 18(1), 153–188. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>
- Muslih, M., Rahman, R. A., Kusuma, A. R., Rohman, A., & Suntoro, A. F. (2021). *Mengurai Disrupsi Paham Keislaman Indonesia Dalam Perspektif Tipologi Epistimologi Abid Al- Jabiri*. 6(2), 16. <https://doi.org/DOI :10.15575/jaqfi.v6i2.14028>
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (2015). *On Justice and Nature of Man*. IBFIM.
- Wan Mohd Nor Wan Daud. (1997). *Budaya Ilmu: Makna dan Manifestasi dalam Sejarah dan Masa Kini*. Dewan Bahasa &Pustaka Kuala Lumpur.
- Zaid, A. H., Kusuma, A. R., & Fadillah, N. H. (2023). *Problem Ekonomi...* 07(01). <https://doi.org/DOI : 10.29040/jie.v7i1.7511>
- Zarkasyi, H. F. (2012). *Misykat (Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam)*. INSISTS-MIUMI.
- Zarkasyi, H. F. (2013). Worldview Islam dan Kapitalisme Barat. *TSAQAFAH*, 9(1), 15. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.36>
- Zarkasyi, H. F. (2015). Tamaddun sebagai Konsep Peradaban Islam. *TSAQAFAH*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i1.251>